

Edisi Ketiga

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.

Editor:

Muhammad Nauval Omar, S.H.



Daftar Isi

KATA SAMBUTAN

Oleh: Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, S.H.

v

KATA SAMBUTAN

Oleh: Karnaen A. Perwataatmadja, S.E., MPA., FIIS.

vii

KATA PENGANTAR

Edisi Ketiga, Cetakan Keenam

xi

KATA PENGANTAR

Edisi Ketiga, Cetakan Kelima

xiii

KATA PENGANTAR

Edisi Revisi

xv

SEKAPUR SIRIH

xix

BAB 1 SISTEM HUKUM DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

1

- A. Sistem Hukum Islam.....1
 - 1. Pengertian Sistem Hukum Islam.....1
 - 2. Hubungan Hukum Islam dengan Agama Islam4
 - 3. Istilah-istilah Penting dalam Penerapan Hukum Islam.....4
 - 4. Sumber Hukum Islam.....5
 - 5. Hukum Perikatan Islam.....8
 - 6. Hak Milik dalam Hukum Perikatan Islam9
 - 7. Konsep Perikatan dalam Hukum Islam.....10
- B. Ekonomi Menurut Islam.....19
 - 1. Pengertian Ekonomi Islam19
 - 2. Ciri-ciri Ekonomi Islam.....36

3. Hak Milik dalam Sistem Ekonomi Islam.....	37
4. Asas-asas Hukum Kegiatan Ekonomi.....	40
BAB 2 PERBANKAN SYARIAH	49
A. Pendahuluan	49
B. Sejarah Perkembangan Bank Syariah	50
1. Perkembangan di Dunia Internasional	50
2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	55
3. Persyaratan Pendirian Perbankan Syariah	63
4. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Syariah	70
5. Kegiatan Usaha dan Produk Perbankan Syariah	73
6. Kebijakan Pemerintah di Bidang Perbankan Syariah	81
C. Tinjauan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia	86
1. Sistem Penghimpunan Dana	86
2. Sistem Penyaluran Dana (<i>Financing</i>)	90
3. Jasa Layanan Perbankan	97
D. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	101
1. Akad dan Aspek Legalitas	103
2. Lembaga Penyelesaian Sengketa	106
3. Struktur Organisasi	107
4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai	110
5. Lingkungan dan Budaya Kerja	111
6. Paradigma Penghimpunan Dana	112
7. Kegiatan Operasional dan Pengelolaan Risiko	113
E. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	113
F. Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia	116
G. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah	118
H. Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah	120
1. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia	120
2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	121
BAB 3 ASURANSI SYARIAH	139
A. Pengertian Asuransi Menurut Syariah	139
B. Sejarah Asuransi Syariah	141
C. Landasan Hukum Asuransi Syariah	145
D. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah	150



E. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.....	154
F. Jenis, Mekanisme Pengelolaan Dana, dan Manfaat Asuransi Syariah.....	156
1. Jenis Asuransi Syariah.....	156
2. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.....	158
3. Manfaat Asuransi Syariah (Takaful).....	160
G. Pembinaan dan Pengawasan	161

BAB 4 TINJAUAN HUKUM PERBANKAN DAN PERASURANSIAN INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan.....	163
B. Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia	165
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.....	166
2. Periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.....	171
3. Periode UU No. 10 Tahun 1998	175
4. Periode UU No. 21 Tahun 2008	179
5. Ketentuan Pelaksanaan Bank Indonesia bagi Perbankan Syariah Sejak Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998.....	182
C. Analisis Terhadap Regulasi Perbankan di Indonesia dari Sudut Pandang Hukum Islam.....	185
D. Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan di Bidang Asuransi dalam Kaitannya dengan Asuransi Syariah	199
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	199
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).....	200
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo. Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.	201
4. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,	

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.	204
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.	207
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/Pojk.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.....	211

BAB 5 TINJAUAN TERHADAP KEMUNGKINAN KODIFIKASI HUKUM KONTRAK ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PERASURANSIAN DI INDONESIA	215
A. Pendahuluan.....	215
B. Konsep Kontrak Syariat dalam Perundang-undangan Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia	218
1. Kontrak Baku (<i>Standard Contract</i>)	218
2. Pengaturan Kontrak Baku Secara Syariah	219
3. Pentingnya Membuat Pengaturan Khusus tentang Kontrak Baku bagi Perbankan dan Perasuransian Syariah	221
C. Positifkasi Hukum Perikatan Islam ke dalam Regulasi Perbankan dan Perasuransian di Indonesia	224
D. Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	255
E. Sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.....	260
F. Sistematika Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Perbedaannya dengan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.	264

REFERENSI	275
LAMPIRAN	279
TENTANG PENULIS	347